

Perlu Pengaturan Selaras KUHP-KUHAP

BANTUL (KR) - Diperbaruinya UU No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut mengandung nilai keindonesiaan, masih perlu pengaturan yang selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meski KUHAP menurut rencana diperbaharui pada 2025, memiliki latar belakang secara filosofis dan sosiologis yang tak terpisahkan dari KUHP.

Ahli Hukum Acara Pidana Unnes Dr Cahya Wulandari MHum menyampaikan hal itu dalam seminar nasional di UMY, Sabtu (14/12). Seminar diselenggarakan Fakultas Hukum (FH) UMY dengan tema 'Ide Pembaharuan Hukum Acara Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Keindonesiaan' yang membahas urgensi pembaharuan hukum acara pidana melalui KUHAP dan sinerginya dengan KUHP. Narasumber lain di antaranya Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Harini MH.

Cahya menjelaskan, terdapat pergeseran asas legalitas dalam KUHP terbaru, yang juga mengatur hukum tidak hanya melalui undang-undang. Mengingat ada hukum yang hidup di masyarakat, seperti hukum pidana adat yang banyak terdapat di bebe-

rapa daerah tertentu.

"Hukum pidana adat sendiri memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk benar-benar menerapkannya dengan optimal. Inilah fungsi dari KUHAP sebagai *rules of the game* yang mengatur hukum pidana adat sebagai sumber hukum untuk pidana," ujar Cahya yang juga Kepala Kantor Hukum Unnes ini.

KUHAP yang saat ini berlaku belum mengatur secara jelas terkait model penerapan termasuk pemberlakuan hukum pidana adat. Ini menjadi catatan, yang menurutnya, perlu diperhatikan, mengingat fungsi dari hukum yang hidup di masyarakat dapat menjadi dasar dalam menghapuskan sifat yang melawan hukum atas suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Harini MH menjelaskan adanya Rancangan KUHAP (RKUHAP) saat ini telah mengatur kewenangan hakim dalam memutus tindak pidana. Selain itu, juga membedakan antara putusan yang berupa pemaafan hakim dengan yang dilepas dari segala tuntutan. (Fsy)

TINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA KERJA

Perlu Kurikulum Produktivitas di PT

YOGYA (KR) - Upaya peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga kerja Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari peran dunia pendidikan. Kurikulum perguruan tinggi (PT) harus terus disempurnakan untuk menghadapi pergeseran dunia industri, seperti ekonomi digital, AI, green economy dan sirkular ekonomi.

Demikian dikatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Prof Yassierli ST MT PhD saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar dan Rapat Koordinasi Nasional, Akademisi dan Saintis Indonesia (Asasi) 2024 di Hotel Grand Rohan Yogyakarta, Sabtu (14/12). Acara diikuti ratusan peserta dari 40 perguruan tinggi negeri/ swasta se-Indonesia.

Menurut Menteri Yassierli, untuk mencetak profil tenaga kerja Indonesia yang

berdaya saing dan kompeten, perlu kurikulum/konten produktivitas di perguruan tinggi (negeri/swasta) sebagai penghasil lulusan/calon tenaga kerja. Oleh karena, itu Kementerian Ketenagakerjaan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

"Jadi terkait konten produktivitas ini, yang merumuskan dari kita (Kemnaker) dulu, baru setelah terbentuk akan kita koordinasikan dengan Kemdik-



KR-Devid Permana
Menteri Yassierli

tisaintek. Kita berharap semua kampus di Indonesia belajar tentang produktivitas," katanya.

Ketua Asasi, Prof Dr apt Elfahmi MSi mengatakan, Asasi berkomitmen berkontribusi kepada hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.

"Jadi perguruan tinggi

berperan lebih pada link match dengan dunia industri, termasuk penyempurnaan kurikulum agar menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai skill tinggi dan siap bersaing di tingkat global," ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan Menteri Yassierli, konten/kurikulum produktivitas ini sangat penting karena ada kontribusinya ke tenaga kerja, modal dan teknologi. Untuk permulaan, pihaknya mengusulkan kurikulum produktivitas mulai diterapkan untuk program studi yang berkaitan dengan teknik (engineering).

"Jadi nanti ada mata kuliah yang mengulas tentang produktivitas, bagaimana mengukurnya dan meningkatkan produktivitas itu," katanya. (Dev)

ANUGERAH DIKTI SAINTEK 2024

UPN Veteran Yogya Raih 4 Penghargaan



Warak Bidang Akademik UPNVY Machya Astuti Dewi (kelima dari kanan) ketika menerima penghargaan.

YOGYA (KR) - Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta menorehkan prestasi gemilang dengan meraih empat penghargaan bergengsi dalam ajang Anugerah Dikti Sainstek 2024. Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendid-

ikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Sainstek).

Penghargaan pertama didapat Wakil Rektor Bidang Akademik Machya Astuti Dewi yang berhasil meraih penghargaan Terbaik I Implementasi Proyek Perubahan Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan

Perguruan Tinggi untuk Pimpinan.

UPNVY juga mendapatkan penghargaan Bronze Winner Anugerah Humas Kategori PTN BLU Sub Kategori Laman dan Bronze Winner Kategori PTN BLU Sub Kategori Pers Mahasiswa atas nama Muhamad Sunendra. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mengantongi penghargaan Bronze Winner Anugerah Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kategori Publikasi (SINTA Award) Sub Kategori Institusi Klaster Utama dengan Skor Publikasi Ilmiah Tertinggi Periode Tahun 2021-2023. (Awh)

KRISNA RESEARCH DISSEMINATION 2024

Membangun UIN Suka Menjadi Unggul

YOGYA (KR) - Sebagai puncak rangkaian kegiatan sepanjang tahun yang fokus pada pengembangan riset, inovasi dan pelaksanaan berbagai program pengabdian kepada masyarakat, UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta menggelar 'Kalijaga Research, Innovations and Community Engagement Awards' (KRISNA) 2024 di Gedung Prof HM Amin Abdullah (Multi Purpose), Selasa (10/12).

"Kegiatan ini wujud kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat," tutur Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhaidi Hasan.

Ditambahkan Prof Noorhaidi, kegiatan ini menjadi momentum untuk merayakan keberhasilan, de-

dikasi dan kerja keras sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga dalam bidang riset, inovasi serta pengabdian kepada masyarakat. Turut hadir pejabat rektorat, ketua dan koordinator pusat LPPM serta segenap dosen di lingkungan UIN Suka.

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan sebagai puncak kegiatan penelitian, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh seluruh sivitas akademika UIN Suka. KRISNA Awards tahun ini mengusung tema 'Nurturing Religiosity, Preserving the Environment, and Promoting Peace for a Sustainable Future'.

Penghargaan diberikan kepada individu dan kelompok yang menunjukkan performa terbaik selama 2024. Penilaian didasarkan pada

publikasi karya di jurnal bereputasi seperti Scopus, jumlah karya yang dihasilkan, tingkat sitasi serta dampaknya dalam diskursus akademik di kalangan ilmuwan.

Prof Noorhaidi juga menegaskan pentingnya mendorong penelitian yang diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, prosiding serta bentuk karya ilmiah lainnya.

Sementara itu, Ketua LPPM UIN Suka Dr Abdul Qoyum SEI MScFin menyatakan, diadakannya KRISNA Awards ini harapannya mampu mendorong lebih banyak sivitas akademika di UIN lebih aktif berkontribusi dalam meningkatkan publikasi penelitian. (Feb)

EKONOMI

OJK Blokir 8.000 Rekening Judol

JAKARTA (KR) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, dalam rangka pemberantasan judi online (judol) yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap 8.000 rekening dari data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, di Jakarta, Jumat (13/12) menyebutkan, OJK terus berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) lain termasuk dengan Aparat Penegak Hukum karena OJK juga menjadi bagian dari SATGAS Pemberantasan Perjudian Daring yang telah dibentuk melalui Keppres Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024.

Seluruh stakeholder harus bersama-sama meningkatkan efektivitas penanganan perjudian daring mengingat besarnya tantangan yang dihadapi yang ditandai pula dengan semakin beragamnya aktivitas yang dilakukan.

OJK juga telah meminta bank untuk lebih mewaspadai pemanfaatan rekening dormant, termasuk rekening-rekening yang berasal dari program bantuan pemerintah yang sudah tidak aktif, agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widayarsi Dewi mengatakan, dari aspek layanan konsumen, hingga 30 November 2024 OJK telah menerima 380.943 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 31.099 pengaduan.

Dari jumlah pengaduan tersebut, 11.901 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 10.961 dari industri financial technology, 6.496 dari perusahaan pembiayaan, 1.322 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya.

Dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, dari 1 Januari hingga 30 November 2024, OJK telah menerima 15.350 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 14.364 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 986 pengaduan terkait investasi ilegal.

Sedangkan, dalam penegakkan ketentuan perlindungan konsumen, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada periode Januari-30 November 2024, OJK telah menemukan dan menghentikan 2.930 entitas pinjaman online ilegal dan 310 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain itu menerima informasi 228 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal yang telah dimintakan pemblokiran melalui satuan kerja pengawas bank untuk memerintahkan bank terkait melakukan pemblokiran. Satgas PASTI juga menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) pinjaman online ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.447 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI. (Lmg)

SISTEM E-KATALOG VERSI 6.0

Dorong Efisiensi-Transparansi Pengadaan Pemerintah

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6.0 yang diinisiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom).

Peluncuran E-Katalog Versi 6.0 bersamaan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara Jakarta.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, Katalog Elektronik Versi 6.0 menjadi langkah

nyata Telkom dalam upaya mendukung digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. "Dengan adanya sistem ini, kami berharap dapat menghadirkan solusi pengadaan yang lebih efisien, kompetitif, dan transparan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Telkom senantiasa berkomit-

men untuk menciptakan layanan digital solutif dan inovatif yang sejalan dengan program Pemerintah," ujar Ririek di Jakarta, Sabtu (14/12).

Menurut Kepala LKPP Hendrar Prihadi, E-Katalog Versi 6.0 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik. Melalui fitur terbarunya, E-Katalog ini memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam melakukan transaksi atau belanja Pemerintah. "Inovasi sistem digital pengadaan E-Katalog Versi



Jajaran LKPP dan Telkom menyampaikan keterangan pers soal E-Katalog Versi 6.0.

6.0 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memantau dengan jauh lebih baik atas

proses pengadaan Pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat siapa saja. (San)

HYTERA RAYAKAN HUT KE-20

Buka Kantor Baru dan Konferensi para Mitra



Kegiatan 20 tahun Hytera

JAKARTA (KR) - Hytera Communications, penyedia teknologi dan solusi komunikasi profesional global yang terkemuka, merayakan 20 tahun bisnisnya di Indonesia dengan membuka resmi kantor yang telah direnovasi dan diperluas di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Tonggak sejarah ini menegaskan komitmen berkelanjutan Hytera terhadap pasar Indonesia dan perannya dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor utama.

Kantor baru ini dilengkapi ruang kerja yang lebih luas, showroom untuk pro-

duktif dan ruang perawatan khusus serta fasilitas modern lainnya. Peningkatan dan pembaruan fasilitas ini mencerminkan visi Hytera dalam meningkatkan kolaborasi, menghadirkan inovasi, dan memberikan dukungan pelanggan yang luar biasa.

Showroom produk dirancang dengan pendekatan yang berfokus pada interaksi, menawarkan pengalaman mendalam bagi para mitra dan pelanggan untuk menjelajahi produk terbaru Hytera. Showroom ini menonjolkan solusi inovatif perusahaan yang akan meningkatkan efisiensi komunikasi dan memastikan keamanan di berbagai industri. Selain itu, showroom ini juga berfungsi sebagai pusat pelatihan untuk memberdayakan para mitra dan pengguna akhir dengan keahlian dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengembangkan bisnis secara efektif dan memberikan value luar biasa kepada pelanggan.

KEMENAG PASTIKAN TRANSPARAN Lelang Pesawat Angkutan Haji 2025

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama (Kemenag) mulai melakukan proses seleksi penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji 1446 H/2025 M. Tahap pendaftaran dibuka Kamis (12/12) di kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Kemenag mengundang delapan maskapai penerbangan nasional Indonesia dan Arab Saudi. Sebanyak enam maskapai hadir dan mengambil dokumen penyediaan transportasi udara, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Pelita Air, Saudia Airlines dan Flynas.

Direktur Layanan Haji dalam Negeri Muhammad Zain mengatakan, proses penyediaan mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1197 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi udara Jemaah Haji Tahun 1446 H/2025 M. M Zain memastikan prppes penyediaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Pelayanan haji tahun ini harus maksimal, lebih baik dari tahun lalu, dan harus ada peningkatan kualitas layanan," lanjutnya.

Indonesia mendapat 221.000 kuota haji 1446 H/2025 M. Kuota ini terdiri 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. "Biaya penerbangan sebagai komponen terbesar biaya penyelenggaraan haji agar bisa lebih efisien dan layanan lebih maksimal," pesannya.

Dalam pertemuan dengan maskapai ini, Ditjen PHU menjelaskan tentang persyaratan administrasi, teknis pra operasional dan pasca operasional yang harus dipenuhi jika menjadi penyedia transportasi udara jemaah haji.

Hadir dalam pertemuan ini, perwakilan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Capt Affandi yang menyampaikan, Kementerian Perhubungan mendukung layanan penerbangan, mulai dari penyediaan pesawat, slot time penerbangan, hingga pengawasan saat operasional haji. (Ati)